

**STRATEGI DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERIKANAN DAN
PERTANIAN DALAM PROGRAM
PENGEMABANGAN PERIKANAN
TANGKAP DI TANJUNG LIMAU KOTA
BONTANG**

Betsy Nona Madia, Muhammaad Noor, Budiman

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

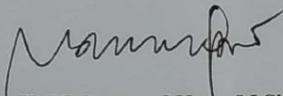
Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Strategi Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Dan
Pertanian Dalam Program Pengemabangan Perikanan
Tangkap Di Tanjung Limau Kota Bontang
Pengarang : Betsy Nona Madia
NIM : 1502025032
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1
Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul.

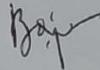
Samarinda, 17 Januari 2023

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Noor, M.Si
NIP.19600817 198601 1 001

Pembimbing II,



Budiman, S.IP., M.Si
NIP.19770712 200501 1 003

Bagian di bawah ini
DI ISI OLEH STAF PRODI YANG DI TUGASKAN

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Ilmu Pemerintahan
Volume :
Nomor :
Tahun : 2023
Halaman :

STRATEGI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN DALAM PROGRAM PENGEMABANGAN PERIKANAN TANGKAP DI TANJUNG LIMAU KOTA BONTANG

Betsy Nona Madia¹

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan strategi Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang dalam menganalisis dan mendeskripsikan strategi dinas dalam program pengembangan perikanan tangkap di Tanjung Limau. Fokus dalam Penelitian ini adalah strategi, pelaksanaan dan hasil strategi dinas dalam program pengembangan perikanan tangka pada program pengembangan perikanan tangkap di Tanjung Limau Kota Bontang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan beberapa informan, serta dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber data dilakukan dengan purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat diidentifikasi bahwa beberapa program pengembangan perikanan tangkap dalam pelaksanaannya masih kurang optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi dengan masyarakat nelayan kecil, serta dengan adanya regulasi antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dalam menangani sumber daya laut.

Kata Kunci: Strategi, Pengembangan Perikanan Tangkap, Kota Bontang.

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: betsynonamadia@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia memiliki banyak pulau-pulau dari sabang hingga merauke. Letak geografis wilayah Indonesia berkisar 7,81 juta km² yang terdiri dari wilayah daratan sebesar 2,01 juta km², wilayah laut sebesar 3,25 juta km², kemudian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2,55 juta km². Indonesia merupakan Negara yang memiliki perairan lebih besar dari pada wilayah daratan, oleh sebab itu Indonesia juga disebut sebagai Negara Maritim. Potensi perikanan Indonesia diharapkan dapat menjadi sektor unggulan perekonomian nasional. Oleh karena itu, potensi tersebut harus dimanfaatkan, dikembangkan dan dilestarikan secara optimal, bahwa ini merupakan tanggungjawab bersama pemerintah dan seluruh masyarakat yang terlibat guna meningkatkan pendapatan dan mengarah kepada kesejahteraan rakyat, menjaga dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan terutama dalam hal perikanan tangkap.

Kota Bontang memiliki letak geografis wilayah laut lebih besar dari pada wilayah daratanyang memiliki luas wilayah 34.977 ha (70,3%) wilayah laut dan 14.780 ha (29,7%) wilayah daratan. Berdasarkan persentase tersebut Wilayah laut Kota Bontang lebih luas dari pada wilayah daratan oleh sebab itu hasil produksi kota Bontang juga banyak diperoleh dari hasil perikanan laut. Selain kaya akan potensi perikanan, Kota Bontang juga memiliki sumber daya lainnya dalam Bidang Pertanian, Bidang Pertambangan, Bidang Industri, Bidang Perdagangan, Bidang Jasa, Bidang Pariwisata dan Perhotelan.

Salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam memberdayakan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan, serta pengembangan SDM dan kelompok nelayan terdapat dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan. Berdasarkan Undang Undang tersebut, bahwa pemerintah berkewajiban untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana perikanan. TPI merupakan memiliki fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha perikanan dan kesejahteraan nelayan.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih saja terjadi beberapa permasalahan. Pada tahun 2011 hingga 2016 Tempat Pelelangan Ikan masih jauh dari kondisi yang baik, di mana terdapat tempat penampungan air yang di gunakan untuk membersihkan ikan dengan kondisi bak yang berlumut dan tidak tertutup dan dibiarkan terbuka terkena air hujan, tidak menutup kemungkinan penampungan air tersebut sebagai tempat berkembang biaknya jentik-jentik nyamuk, namun terlihat kondisi pada saat itu, TPI yang terlihat usang dikarenakan hanya dipergunakan saat kapal ikan bermuatan besar bermuatan 10 gt ke bawah yang bersandar.

Berdasarkan fenomena yang terjadi terdapat beberapa permasalahan yang dapat menghambat program pengembangan perikanan tangkap yaitu sebagai berikut:

Dilansir dari Klikbontang.com, pada awal tahun 2016 pasokan ikan di tempat pelelangan ikan Tanjung Limau mencapai hasil produksi 300 Ton, beberapa tahun berselang tempat pelelangan ikan di Tanjung Limau mengalami kemunduran. Permasalahan paling utama adalah dangkalnya pelabuhan pada saat air laut dalam keadaan surut terendah sehingga menjadi penghambat utama masuknya kapal-kapal

penangkap ikan berkapasitas besar, kapal ber Gross Tonage (GT) di atas 10 tidak bisa masuk, lebih dari 3 kapal kesulitan saat akan dilakukan bongkar muatan atau ketika akan memutar kapal baik dalam keadaan pasangataupun surut.

Kerangka Dasar Teori

Strategi

Menurut Morris dalam Umar (2002:31), strategi merupakan suatu proses penentu rencana setiap para pemimpin yang memiliki tujuan jangka panjang sebuah organisasi yang disertai dengan upaya-upaya sehingga tujuan tersebut dapat tercapai.

Menurut Akdon (2011:12), pada dasarnya strategi merupakan sebuah rencana yang berskala besar dan berorientasi pada jangka panjang ke masa depan yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya interaksi secara efektif dengan kondisi lingkungan bersaing yang mengarah pada optimalisasi capaian dalam tujuan dan sasaran yang bersangkutan.

Program

Menurut Donald B. Yarbrought dkk (2010: 24), aplikasi sistematis program sebagai sumber daya, dipandu oleh logika, keyakinan, dan asumsi, untuk menentukan kebutuhan manusia dan faktor terkait. Didefinisikan sepenuhnya, sebuah program adalah Serangkaian aktivitas sistem yang direncanakan, gunakan sumber daya yang dikelola, mencapai tujuan yang ditentukan, terkait dengan kebutuhan khusus, individu atau kelompok manusia yang spesifik, pasti, dan berpartisipasi, kemudian dalam keadaan tertentu, menghasilkan keluaran, hasil dan dampak yang dapat direkam, sistem kepercayaan hipotetis (eksplisit atau implisit) (diagnosis, kausalitas, intervensi, dan teori implementasi tentang cara kerja program), memiliki biaya dan manfaat yang spesifik dan dapat diinvestigasi.

Menurut Mudasir (2012), program sering kali dikaitkan dengan sebuah perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan. Sedangkan menurut Muhaimin, dkk (2009:349), program merupakan pernyataan yang berisikan sebuah kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang memiliki keterkaitan agar mencapai sasaran yang sama. Dengan di bawah administrasi yang sama, sasaran yang saling berkaitan dan melengkapi satu dengan yang lainnya dan diusahakan dan dilaksanakan secara beruntun dan bersamaan.

Program Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian dalam Pengembangan Perikanan Tangkap

Program kegiatan yang dilakukan melalui identifikasi dan telah terhadap program-program prioritas dalam Perda Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021. Adapun program-program perikanan tangkap sebagai berikut:

1. Pendataan statistik perikanan tangkap;
2. Pelayanan usaha perikanan tangkap kecil;
3. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap kecil;
4. Fasilitas bantuan sarana bagi nelayan kecil;
5. Pengoperasian PPI/TPI.

Pengembangan

Menurut *Flippo* dalam Sri Larasati (2018:120), pengembangan merupakan suatu proses dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia agar mampu menghadapi perubahan lingkungan secara internal maupun eksternal melalui pendidikan (peningkatan kemampuan) dan peningkatan keterampilan (melalui pelatihan).

Menurut Mathis dalam Sri Larasati (2018:121), dengan memberikan bekal pengetahuan, perubahan sikap, atau peningkatan keterampilan akan memberikan peningkatan dalam kinerja manajemen saat ini ataupun di masa depan nanti.

Menurut Syafaruddin dalam Sri Larasati (2018:121), pengembangan lebih bersifat formal, yang berkaitan dengan antisipasi kemampuan dan keahlian individu sehingga harus dipersiapkan untuk kepentingan jabatan yang akan datang. Sasaran dan program pengembangan berkaitan dengan aspek yang luas yaitu sebuah peningkatan kemampuan individu untuk mengantisipasi perubahan yang suatu saat akan terjadi tanpa direncanakan (*unplanned change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned change*).

Jenis-jenis Pengembangan

Menurut Sri Larasati (2018:125), bahwa jenis-jenis pengembangan sumber daya manusia terbagi menjadi dua. Pertama, pengembangan secara informal yaitu berdasarkan keinginan dan melatih serta mengembangkan diri dengan cara mempelajari buku-buku literatur yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Kedua, pengembangan secara formal, dalam hal ini perusahaan memberikan tugas kepada karyawan untuk mengikuti pendidikan ataupun pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri atau dengan mengirimkan ke perusahaan lain.

Perikanan Tangkap

Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah sumua yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya berawal dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan memasarkan yang dilakukan dalam sistem bisnis perikanan.

Menurut Daniel Monintja dan Roza Yusfiandayani (2001:56), perikanan tangkap merupakan suatu kegiatan ekonomi yang tergolong dalam penangkapan atau pengumpulan hewan dan tanaman air yang hidup di laut atau perairan umum secara bebas.

Menurut Zubair dan Yasin (2011:7), usaha perikanan dapat dipandang sebagai suatu perpaduan faktor produksi atau suatu barang antara yang dihasilkan faktor-faktor produksi klasik tenaga kerja dan barang-barang modal atau apapun yang dianggap sejenisnya.

Komponen perikanan tangkap disebut dengan elemen atau subsistem yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Kesteven (1973) dalam setiawan (2011:6) sistem perikanan terdiri atas subsitem yaitu sebagai berikut:

1. Sarana produksi

Sarana produksi adalah salah satu faktor pendukung berkembangnya usaha perikanan. Berjalannya fungsi sarana produksi secara optimal akan dapat

menunjang keberlangsungan kegiatan perikanan tersebut, seperti penyediaan alat tangkap, pabrik es, instalasi listrik, galangan serta pendidikan pelatihan tenaga kerja.

2. Usaha penangkapan

Terdapat dua jenis usaha penangkapan yang pertama, unit penangkapan adalah suatu teknis dalam melakukan operasi penangkapan yaitu alat yang digunakan dalam menangkap, kapal dan nelayan. Kedua, unit sumber daya yang terdiri dari spesies yaitu, habitat seperti mangrove, terumbu karang serta musim.

3. Prasarana (Pelabuhan)

Merupakan fasilitas yang diperuntukan untuk menunjang dalam usaha perikanan seperti kondisi dermaga, kolam pelabuhan, tempat pelelangan ikan, kios perbekalan, SPBN, suplai air tawar, bengkel alat serta fasilitas penentu kesinambungan penangkapan ikan di laut.

4. Unit pengolahan

Dapat disebut juga dengan unit agroindustri perikanan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkapan ikan. Dari hasil tangkapan selain dijual dalam keadaan segar, sebagian melalui proses pengawetan atau perubahan produk sesuai dengan permintaan pasar.

5. Unit pemasaran

Merupakan sebuah unit penentu harga dan pendapatan usaha penangkapan.

6. Masyarakat Pembina/Penyediaan layanan pendukung

Dalam hal ini juga melibatkan adanya peran lembaga pemerintahan, peran sistem informasi, kapasitas usaha penangkapan ikan, asper peraturan kemudian masyarakat memiliki peran sebagai konsumen.

Metode Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Strategi Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian dalam program pengembangan perikanan tangkap di Tanjung Limau Kota Bontang
2. Pelaksanaan Strategi Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian dalam program pengembangan perikanan tangkap di Tanjung Limau Kota Bontang.
3. Hasil Strategi Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian dalam program pengembangan perikanan tangkap di Tanjung Limau Kota Bontang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan lokasi penelitian di Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Jl. MH Thamrin Tanjung Limau, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. Untuk pemilihan *informan* dilakukan melalui metode *Purposive Sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Bahwa dalam hal ini penulis melakukan pengambilan informan dengan memilih seseorang yang dianggap paling mengetahui mengenai hal yang akan ditanyakan, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Selanjutnya pengumpulan data peneliti melakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian lapangan (*Field work search*) dengan cara observasi serta wawancara, serta penelitian dokumen (*document research*). Kemudian teknik analisis data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu, menganalisis data-data sesuai dengan pengumpulan data-data dari hasil wawancara, selanjutnya reduksi data dengan memproses atau

mengolah data yang telah diperoleh, kemudian penyajian data dari hasil penelitian sehingga mampu melakukan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Strategi Dinas dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap di Tanjung Limau Kota Bontang 173

Dalam upaya untuk mewujudkan suatu tujuan dan sasaran suatu pembangunan perikanan diperlukannya strategi pembangunan yang telah terencana dan terukur yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan periode 2016-2021. Pembangunan yang dilaksanakan merupakan suatu usaha pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diembannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam salah satu pelaksanaannya, terdapat beberapa strategi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Perikanan, Pertanian dan Peternakan Berbasis Kawasan. Pemanfaatan potensi pangan, perikanan dan pertanian berbasis kawasan dimaksudkan agar pembangunan ketahanan pangan, perikanan dan pertanian lebih fokus dan terarah.
2. Penguatan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Seperti peningkatan daya saing produk pangan, perikanan dan pertanian melalui peningkatan kualitas produk, dan peningkatan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan pemanfaatan IPTEK yang semakin berkembang.
3. Optimalisasi Pengawasan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Pangan, Perikanan dan Pertanianserta Peternakan Berbasis Masyarakat. Dalam hal ini masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan sumber daya pangan, perikanan, pertanian dan pengelolaan kawasan konservasi serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan perikanan, pertanian dan peternakan yang diperlukan untuk menghindari ancaman degradasi terhadap lingkungan sumber daya perikanan dan pertanian.

Pelaksanaan Strategi Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian dalam program pengembangan perikanan tangkap di Tanjung Limau Kota Bontang

Menindaklanjuti akan hal tersebut, pihak dinas memberikan beberapa program terkait dengan program pengembangan perikanan tangkap. Berikut beberapa program pengembangan perikanan tangkap Dinas Perikanan:

1. Pembangunan Fasilitas PPI/TPI
Pihak dinas menyediakan fasilitas untuk menunjang kegiatan perikanan yang berdasarkan pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 08/MEN/2012 tentang Sarana dan Prasarana, berikut fasilitas sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan/Tempat Pelelangan Ikan Tanjung Limau.

2. Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana bagi Nelayan Kecil
Peraturan walikota memberikan bantuan sarana yang sifatnya hibah bantuan sosial dan pemberian bantuan sarana tersebut diberikan kepada kelompok nelayan yang masih aktif dalam melaporkan kegiatan melaut, serta pemberian bantuan sarana hanya diberikan setiap 1 tahun sekali dengan kelompok nelayan yang berbeda. Bentuk bantuan sosial tersebut diberikan agar memudahkan kelompok nelayan dan meningkatkan perekonomian para nelayan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tanggapan kurang baik dari kelompok nelayan terkait dengan pembagian sarana hibah bansos yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada.
3. Pengoperasian PPI/TPI
terkait dengan regulasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 antara kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam laut sebagai salah satu faktor terhambatnya proses pengerukan dermaga dan hal tersebut juga berdampak pada nelayan saat melakukan bongkar muat ikan di PPI/TPI Tanjung Limau.
4. Pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap kecil
Program pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap kecil oleh dinas perikanan merupakan program pemberdayaan kepada setiap kelompok nelayan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia terkait dengan bantuan sarana dan prasarana, *IUU Fishing*, batasan wilayah saat memancing kepada para nelayan terkait pencapaian dalam mendapatkan hasil tangkapan dengan maksimal. Namun masih ada beberapa kelompok nelayan disekitar tempat pelelangan ikan yang merasakan ketidakadilan dalam memberikan informasi secara menyeluruh, hanya orang terdekat dengan pihak dinas yang sering mendapatkan informasi dari program pendampingan kelompok.
5. Pendataan statistik perikanan tangkap
Dengan mendata beberapa kapal yang sedang melakukan bongkar muat di tempat pelelangan ikan Tanjung Limau maupun melalui data setiap kelompok nelayan yang aktif dalam melakukan mata pencaharian sebagai nelayan. Namun tidak semua nelayan melakukan bongkar muat ikan di tempat pelelangan ikan karena beberapa nelayan melakukan bongkar muat di depan rumah mereka sendiri. Namun, nelayan kecil melakukan perhitungan yang mendekati atau menerka-nerka dari hasil tangkapan mereka, sehingga masih terjadi perhitungan akumulasi yang tidak akurat.
6. Pelayanan usaha perikanan tangkap kecil
Terkait dengan pelayanan usaha perikanan tangkap ada beberapa hal yang telah dilakukan seperti penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan cara menghadapi kondisi ketika cuaca buruk, penggunaan alat tangkap, perijinan kapal serta beberapa hal terkait perikanan tangkap.

Hasil Strategi Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian dalam program pengembangan perikanan tangkap di Tanjung Limau Kota Bontang

Pertanian membutuhkan penanganan lebih untuk proses keberhasilan dari beberapa program pengembangan perikanan tangkap dan pentingnya pengawasan, pengecekan, serta koordinasi secara rutin agar hasil yang dilakukan berjalan secara maksimal. Dari data di atas dapat diidentifikasi bahwa hasil dari strategi dalam program perikanan tangkap yang telah terlaksana dengan baik adalah sebagai berikut:

1. *Jetty* memiliki fungsi untuk memudahkan kapal bersandar di perairan dangkal di TPI Tanjung Limau Kota Bontang. Jumlah awal *jetty* di TPI Tanjung Limau sebanyak 2 unit dan saat ini jumlah *jetty* bertambah menjadi 5 unit.
2. Pagar kawasan yang mengelilingi TPI, karena pada umumnya fungsi pagar kawasan merupakan pembatas suatu area yang bertujuan untuk melindungi atau mengamankan yang terdapat di dalam area tersebut. Panjang pagar kawasan TPI adalah 160 m.
3. Kedai pesisir, merupakan sebuah kantin yang digunakan untuk tempat beristirahat sejenak dan pembangunan kantin tersedia sebanyak 1 unit.
4. Sosialisasi terkait dengan pendampingan kelompok nelayan dalam memberikan pemahaman terkait dengan perikanan tangkap.
5. Memberikan bantuan hibah bansos dalam bentuk barang kepada para kelompok nelayan kecil.

Selanjutnya dengan beberapa program pengembangan perikanan tangkap yang belum terlaksana secara maksimal adalah pengoperasian PPI/TPI Tanjung Limau. Bahwa dalam hal ini antara pihak pemerintah provinsi dan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya alam laut. Yangmana sumber daya alam laut lebih besar berada di wilayah Kota Bontang, akan tetapi penanganan tersebut dalam kewenangan pemerintah provinsi.

Penutup

Kesimpulan

1. Strategi Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian memiliki tiga rencana strategi. Dari ketiga strategi tersebut belum memiliki indikator-indikator pencapaian secara spesifik. Karena masih terdapat program yang belum terlaksana, hal ini menunjukkan bahwa strategi Dinas Perikanan belum memenuhi dari target yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan strategi dalam beberapa program pengembangan perikanan tangkap masih belum secara maksimal terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat pada beberapa program pengembangan perikanan tangkap seperti karena beberapa persoalan terjadi yaitu, terdapat kelompok nelayan yang memiliki kedekatan kepada beberapa pihak dinas sehingga menimbulkan perbedaan jarak antara kelompok satu dan kelompok lainnya, pengawasan yang kurang maksimal dalam pendataan statistik perikanan tangkap, hinggadangkalnya dermaga tempat pelelangan ikan sampai saat ini belum dilaksanakan pengerukan karena terkendala antara kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam laut.
3. Hasil strategi yang telah dilaksanakan oleh dinas yaitu, beberapa program yang

sudah terjalankan namun dalam pelaksanaannya masih saja mengalami kendala. Dangkalnya dermaga merupakan salah satu program pengembangan perikanan tangkap yang belum terjalankan secara maksimal karena adanya regulasi dari pemerintah provinsi dan daerah Kota Bontang.

Saran

1. Sebaiknya Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian melakukan optimalisasi kembali dari strategi yang telah ditetapkan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja serta kualitas yang mendukung pencapaian dari visi dan misi Kota Bontang
2. Oleh karena itu, diharapkan dalam pelaksanaan strategi tersebut pihak dinas melaksanakan secara profesional, memberikan koordinasi dan informasi antar instansi serta memaksimalkan sumber daya anggota dinas untuk turun langsung kelapangan dalam hal mengawasi jalannya pelaksanaan program, meningkatkan pengawasan dan audit dalam setiap program-program yang telah dilakukan agar selama pelaksanaan memiliki komunikasi yang baik hingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial terhadap masyarakat.
3. Diharapkan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian memiliki langkah proaktif dalam menangani dangkalnya dermaga di tempat pelelangan ikan Tanjung Limau Kota Bontang. Agar pengoperasian TPI Tanjung Limau dapat beroperasi secara maksimal sehingga mampu meningkatkan hasil perikanan tangkap di Kota Bontang.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cepi Safruddin Abdul. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa Dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Grigg, N. 1988. *Infrastructure Engineering and Management*, John Wiley & Sons.
- Grigg, N. Dan Fontane, D. G. 2000. *Infrastructure System Management & Optimazation Internasional Civil Engineering Departement Diponegoro University*.
- Haulian, Fadhil Ikwan. 2016. *Evaluasi Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Penyaluran Tenaga Kerja Di Kota Samarinda*. Samarinda: Skripsi Universitas Mulawarman.
- Jumansyah, 2015. *Perbandingan Sistem Rekapitulasi Perhitungan Suara Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Dan Tahun 2014 Di Kota Samarinda*. Samarinda: Skripsi Universitas Mulawarman.
- Lexy. J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Larasati, Sri. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher CV. Budi Utama.
- Mawuntu, Vivi Christovani. 2015. *Profil Perikanan Tangkap Dan Strategi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Di Karimunjawa Jawa Tengah*. Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro.

- Sulistiwati, Henny.2017. Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Dalam Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Kemasan Di Samarinda.Samarinda: Skripsi Universitas Mulawarman.
- Yahya, Emil. 2013. Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Dasar Fungsional Dalam Strategi Peningkatan Produksi Di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kota Tegal Jawa Tengah. Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro (diakses 24 september 2018)

Dokumen-dokumen

- Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Dan Pertanian Kota Bontang Tahun 2016-2021.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 16/MEN/2006 Tentang Pelabuhan Perikanan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20/PERMEN-KP/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang (menurut lapangan usaha 2012-2016) Badan Pusat Statistik Kota Bontang.

Sumber Internet:

- http://media.unpad.ac.id/thesis/230110/2009/230110090044_2_3333.pdf. (diakses 1 juli 2019).
- <http://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>, diakses (diakses 20 Maret 2020).
- <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>(diakses 20 Maret 2020).